



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI VI DPR RI  
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I  
TERHADAP  
RUU TENTANG PENGESAHAN  
*REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*  
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua  
Syaloom  
Om Swastiastu  
Namo Buddhaya  
Salam Kebajikan*

Yth

1. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
2. Saudara Menteri Perdagangan;
3. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
4. Saudara Menteri Luar Negeri RI atau yang mewakili;
5. Saudara-saudara Anggota DPR RI;
6. Hadirin sekalian yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) atau RCEP dalam Rapat Paripurna hari ini.

Pada tanggal 4 April 2022, Presiden RI telah mengirimkan Surat Nomor: R-13/Pres/04/2022 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan RCEP dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Perdagangan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi pada tanggal 23 Mei 2022 menugaskan Komisi VI DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah untuk membahas RUU dimaksud.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pendalaman terhadap RUU RCEP. Pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri) untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah, pandangan umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU RCEP. Selanjutnya dilakukan pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 16 DIM batang tubuh dan 9 DIM Penjelasan RUU RCEP.

Dari beberapa DIM yang dibahas, terdapat satu perubahan pada batang tubuh yaitu DIM Nomor 16 berkaitan dengan pengundangan Undang-Undang yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi Menteri Sekretaris Negara, sesuai amanat Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah RI bersama Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lainnya, serta Pemerintah Negara Australia, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru telah menandatangani *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) pada tanggal 15 November 2020, dan untuk Pemerintah Indonesia penandatanganannya dilaksanakan di Bogor, Indonesia.

Dalam pembahasan RUU RCEP Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, seluruh Fraksi telah menyetujui bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional harus melindungi kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Bagi Indonesia, seluruh negara anggota RCEP merupakan mitra strategis perdagangan yang berpotensi besar untuk memperluas jangkauan Indonesia memasuki rantai nilai global. Selain itu, RCEP diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang intens dan efektif

untuk memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan; menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif; peningkatan peluang usaha barang, jasa, dan investasi ke dalam rantai nilai regional.

Selain berbagai manfaat tersebut, Pemerintah juga perlu mengantisipasi tantangan besar perjanjian ini, di antaranya peningkatan persaingan di pasar domestik; intensifikasi pelaksanaan *roadmap Indonesia Making 4.0*; percepatan dan penguatan infrastruktur telekomunikasi; penguatan *cyber security* dalam perekonomian digital; peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi; peningkatan digitalisasi UMKM; optimalisasi sistem perizinan dan investasi melalui *Online System Submission* (OSS); dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum mengakhiri Laporan Komisi VI DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi VI DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Para Anggota Komisi VI DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI, Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Penelitian. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, media massa, pemberitaan dan lain-lain yang telah berkontribusi dalam peliputan kegiatan RUU RCEP.

Demikianlah Laporan Komisi VI DPR RI disampaikan dan kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini terhadap RUU tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI guna disahkan menjadi Undang-Undang.

***Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh  
Om shanti shanti shanti om  
Namo Buddhaya***

Jakarta, 30 Agustus 2022  
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

**ARIA BIMA  
A-189**